



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diperlukan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Negara Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur Pengawasan Pemerintah Daerah.

7. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output) , hasil (outcome), dampak (impact).
8. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis kabupaten.
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama ini adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Ruang lingkup Indikator Kinerja Utama yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah;
- b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan acuan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah menjadi pedoman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai RPJMD;
- (3) Indikator Kinerja Perangkat Daerah digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala perangkat daerah disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

Pasal 6

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Daerah, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Dinas Lingkungan Hidup;
 7. Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 9. Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 14. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 15. Dinas Perpustakaan dan Arsip
 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 17. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 18. Dinas Peternakan dan Perkebunan;
 19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 20. Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - e. Badan Daerah, terdiri atas :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah;
 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

- f. Kecamatan, terdiri atas :
1. Kecamatan Rambah;
 2. Kecamatan Rambah Samo;
 3. Kecamatan Rambah Hilir;
 4. Kecamatan Rokan IV Koto;
 5. Kecamatan Pendalian IV Koto;
 6. Kecamatan Tambusai Utara;
 7. Kecamatan Tambusai;
 8. Kecamatan Tandun;
 9. Kecamatan Kabun;
 10. Kecamatan Ujungbatu;
 11. Kecamatan Kunto Darussalam;
 12. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam;
 13. Kecamatan Bonai Darussalam;
 14. Kecamatan Kepenuhan Hulu;
 15. Kecamatan Kepenuhan;
 16. Kecamatan Bangun Purba.

(3) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Inspektorat Daerah diberi tugas untuk :

- a. melakukan *review* atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 2 Februari 2022

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 3 Februari 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

MUHAMMAD ZAKI

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, SH, MH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2022 NOMOR : 15

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,06	2,50	3,00	3,50	4,00
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	69,47	69,67	69,86	69,93	69,98
3	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Persen	11,86	12,77	13,75	14,84	15,98
4	PDRB perkapita (pendapatan perkapita penduduk)	Juta Rp/Kapita / Tahun *ADHB	50,29	50,45	50,95	51,23	51,67
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,33	4,30	4,27	4,24	4,21
6	Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,14	10,06	9,97	9,89	9,80
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	65,37	65,85	66,33	66,81	67,29
8	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial/SARA	Persen	100	100	100	100	100
9	Indeks Gini	Point	0,279	0,278	0,277	0,276	0,275
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	CC	B	B	BB
11	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Persen	55,49	57,47	59,46	61,44	63,43

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, SH, MH
 Penata Tk. I
 NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	SEKRETARIAT DAERAH						
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	B	BB	BB
	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	CC	CC	B	B	BB
	Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial	Persen	90	90	90	95	95
	Skor LPPD	Skor	Sangat Tinggi (3,05)	Sangat Tinggi (3,05)	Sangat Tinggi (3,10)	Sangat Tinggi (3,15)	Sangat Tinggi (3,20)
	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	15	16	17	18	19
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	42	43	44	45	46
	Persentase penyelesaian Tapal batas daerah	Persen		90	90	95	95
	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	55,68	60,32	64,96	69,6	74,24
	Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara / Tanah Garapan	Persen	90	90	95	95	95
	Rekomendasi izin lokasi	Persen	90	90	95	95	95
2	SEKRETARIAT DPRD						
	Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	85	87,5	90	92,5	95

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda	Persen	85	87,5	90	92,5	95
3	INSPEKTORAT DAERAH						
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
	Persentase hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP yang di tindaklanjuti	Persen	80	85	85	85	90
	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan RB	Perangkat daerah	29	29	29	29	29
	Persentase penurunan jumlah rekomen dasi hasil review dokumen perencanaan, keuangan dan Laporan kinerja	Persen	60	75	80	85	90
	Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM)	Perangkat daerah / Unit Kerja Pelayanan	5	9	10	11	11
4	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA						
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	Persen	25,75	26	26,25	26,5	26,75
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam SD/MI	Persen	94,67	95,8	96,92	98,05	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam SMP/MTS	Persen	95,12	96,44	97,76	99,09	100,41
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	114,77	115,77	114,77	116,77	114,77

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 tahun PAUD	Persen	87	89	91	93	99
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 tahun SD/MI / Paket A	Persen	94,67	95,8	96,92	98,05	100
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 tahun SMP/MTs / Paket B	Persen	95,12	96,44	97,76	99,09	100,41
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan	Persen	90	95	97	99	100
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	87	89	91	93	99
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	107,63	108,98	108,79	109,41	109,12
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	98,41	99,2	99,98	100	100,79
	Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	Persen	99	99	99	99	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Persen	87	89	91	93	99
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI / Paket A	Persen	98,27	98,32	98,37	98,42	98,47
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs / Paket B	Persen	98,06	90,29	91,52	92,74	93,97
	Angka Partisipasi Murni (APM) Kesetaraan	Persen	87	89	91	93	99
	Angka Putus Sekolah PAUD	Persen	20	10	5	5	0
	Angka Putus Sekolah SD/MI	Persen	0,68	0,62	0,56	0,5	0,44
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Persen	0,33	0,29	0,25	0,21	0,17
	Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD	Persen	90	95	97	98	100
	Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI	Persen	85	90	92,5	95	95
	Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs	Persen	80	82,5	85	87,5	90
	Persentase sekolah yang terakreditasi Kesetaraan	Persen	100	100	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat	Persen	0,03	0,04	0,049	0,053	0,061
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	0	Emas 2,	Emas 3,	Emas 5,	Emas 5,

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
				Perunggu 2, perak 10	Perunggu 5, perak 13	Perunggu 5, perak 20	Perunggu 20, perak 15
	Persentase wirausaha muda	Persen	80	80	80	80	80
5	DINAS KESEHATAN						
	Status Akreditasi RSUD	Status	Madya	Madya	Utama	Utama	Paripurna
	Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) pada Balita	Persen	2,45	2,40	2,35	2,30	2,25
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Rasio	2,5	2,4	2,3	2,1	2
	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Rasio	45	44	43	42	40
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada BALITA	Persen	17	15	14	12	10
	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,0041	0,0041	0,0042	0,0043	0,0043
	Cakupan puskesmas (per 30.000 penduduk)	Rasio	1,18	1,23	1,28	1,28	1,34
	Cakupan puskesmas Pembantu (seluruh desa)	Persen	92,4	93,8	96,6	97,9	100
	Persentase penduduk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	72	82	92	92	100
	Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu	Persen	60	70	80	90	100
	Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan Layanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan Layanan Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Cakupan Layanan Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita DM Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita TBC sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita ODGJ Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar	Persen	100	100	100	100	100
	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,00147	0,00148	0,00149	0,00150	0,00151
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	Persen	55,49	57,47	59,46	61,44	63,43
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	71,04	73,49	75,77	75,85	78,59
	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir Yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Persen	75,4	76	76,3	76,5	76,8
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	45,71	57,14	68,57	80	91
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih	Persen	60,52	65,13	69,23	74,00	78,98
	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	Persen	76,20	80,90	86,00	91,30	96,32
	Jumlah unit pengelolaan air bersih	Unit	16	16	16	16	16
	Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik	Persen	71,4	73,19	75,01	76,89	78,81

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW	Rasio	0,7131	0,7345	0,7566	0,7793	0,8026
	Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani	Hektar	1,71	1,52	1,33	1,14	0,96
	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persen	67,71	69,7	72,08	73,52	74,99
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	51	54	56	59	62
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif	Persen	40	50	60	70	90
	Persentase tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	79	84	89	94	100
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah	Persen	-	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	tanggap darurat bencana (SPM)						
	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	97	98	99	100	100
	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM)	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang memperoleh bantuan sosial	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	5	5,5	5,7	5,8	6
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	0,007	0,005	0,004	0,003	0,002
	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani	Persen	83	85,3	87	90,1	95,7
	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Nindya	Utama	Utama	Utama
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	point	65,37	65,85	66,33	66,81	67,29
	Peningkatan Indeks Kualitas Air	point	59,37	59,47	59,57	59,67	59,77
	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	point	87,34	87,44	87,54	87,64	87,74
	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	point	35,06	36,89	38,72	40,55	42,38
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	18,87	18,95	19,03	19,11	19,18
	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang	Persen	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	ditindaklanjuti						
10	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0,46	0,39	0,33	0,26	0,2
	TFR (Total Fertility Rate)	Rasio	2,47	2,45	2,43	2,42	2,41
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67	69	69	70	70
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	17,5	15,5	15,5	14,5	14,5
	Ratio Akseptor KB	Persen	74,45	74,5	74,6	74,75	75
	Cakupan Pasangan Usia Subur PUS yang istrinya dibawah 20 tahun	Rasio	0,5	0,3	0,25	0,2	0,15
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persen	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA						
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	1,55	3,1	8,40	9,95	11,5
	Persentase BUMDes yang berkembang	Persen	55,14	61,14	67,64	74,54	81,74
	Persentase PKK Desa yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Posyandu yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase LPM Berprestasi	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	7,69	15,38	23,08	30,77	38,46
12	DINAS KOPERASI UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
	Persentase koperasi berkualitas	Persen	15,43	16,46	17,47	18,45	19,30
	Persentase koperasi aktif	Persen	48,66	51,01	53,35	55,7	58,04
	Jumlah UMKM yang dikembangkan	UMKM	50	50	60	60	60
	Jumlah UMKM yang dibina	UMKM	5000	5000	5000	5000	5000

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan ditempatkan	Orang	50	115	115	115	115
	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	Orang	178	212	212	212	212
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	34,29	35,00	35,56	36,00	36,36
	Jumlah wilayah transmigrasi yang dibina dan dikembangkan (UPT)	UPT	0	1	1	0	1
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Rasio	0,95	0,98	0,98	1	1
	Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	Persen	50	60	70	80	90
	Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun	Persen	95,61	96,11	97,10	97,59	98,09
	Cakupan kepemilikan akta kematian	Persen	100	100	100	100	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam mengurus dokumen kependudukan	Indeks	93	95	97	98	98
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Persen	97,92	98	99	100	100
	Rasio pasangan berakta nikah	Rasio	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
14	DINAS PERHUBUNGAN						
	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio	23,25	23,50	23,75	24,00	24,25
	Jumlah pengujian kendaraan bermotor	Unit	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
	Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun	Persen	10	10,5	11	11,5	12
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
	Indeks sistem pemerintahan berbasis	Indeks	2,75	3	3,25	3,5	4

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	elektronik (SPBE)						
	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	50	60	70	80	90
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Persen	50	68,75	87,50	93,75	100
	Data/informasi/ statistik yang terintegrasi	ketersediaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	20	30	40	50	60
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						
	PAD Sektor Pariwisata (Dalam Juta)	Rupiah	2.722,63	2.967,67	3.234,76	3.525,88	3.843,21
	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan dan dikelola	Persen	6,45	11,82	15,05	16,12	18,27
	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	876.535	964.118	1.060.607	1.166.667	1.283.334
	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	Persen	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya	Kali	20	40	50	60	70
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	Persen	5,25	9,97	10,76	10,76	11,02
	Jumlah warisan budaya tak benda/karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	WBTB	3	4	4	4	4
	Persentase koleksi Cagar Budaya Benda yang dilindungi	Persen	-	11,81	15,74	19,68	23,62
17	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN						
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	58,03	63,25	68,95	75,15	81,92
	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	83,2	84	84,8	85	85,8
	Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Persen		20	20	20	20
	Persentase desa bebas dari status rawan pangan	Persen	89,79	92,79	95,00	97,00	100,00
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	9268,86	9653,77	10057,16	10479,92	10923
	Pendapatan rata rata Pembudidaya ikan dan Nelayan	Rupiah	41.200.000	43.500.000	45.600.000	47.800.000	49.300.000
	Cakupan bina kelompok Perikanan	Persen	8,1	9,4	9,4	9,4	9,4
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP						
	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Persen	10	20	30	40	50
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	9,06	9,12	9,24	9,31	9,46
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,0003	0,0003	0,0004	0,0004	0,0005
	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Orang	5.245	10.287	12.852	14.620	16.540
	Koleksi buku yang tersedia	Eksemplar	49.319	49,519	50.755	51.405	52.405

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	diperpustakaan daerah						
	Rasio pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	Rasio	0,0022	0,0025	0,0029	0,0037	0,0041
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	40	53,33	53,33	60	60
	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	Persen	58	60,5	62	63,5	65
19	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	4,21	4,76	4,94	5,06	6,09
	Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA	rupiah	475.000.000.000	498.750.000.000	524.687.500.000	552.650.000.000	588.500.000.000
	Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN (LKPM)	rupiah	975 M	990 M	1060 M	1113 M	1160 M
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,00	80,50	81,50	82,5	83,50
20	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (persen)	Persen	54,32	54,37	54,42	54,47	54,50
	Persentase peningkatan SDM petani dan kelembagaan pertanian	Persen	40	45	50	55	60
	Produktivitas Padi	Kw/ Ha	42,39	42,54	43,00	43,50	44,00
	Produksi Pertanian						
	Produksi Tanaman Pangan						
	Produksi Padi	Ton/Tahun	26.375,06	26.604,52	27.038,40	27.509,40	27.992,80
	Produksi Hortikultura						
	Produksi Bawang	Ton/Tahun	136	152	168	184	200
	Produksi Cabai	Ton/Tahun	380	400	420	440	460
21	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN						
	Produksi Perkebunan						
	Produksi Sawit	Ton/Tahun	694.074	694.768	695.463	696.158	696.855
	Produksi Karet	Ton/Tahun	81.530	81.612	81.963	81.775	81.857

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Produksi Aren	Ton/Tahun	15,65	15,67	15,68	15,70	15,71
	Produksi Peternakan						
	Populasi Sapi & Kerbau	Ekor	50.402	50.906	51.415	51.929	52.449
	Populasi Kambing & Domba	Ekor	18.036	18.208	18.382	18.558	18.736
	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	4,75	4,51	4,29	4,07	3,87
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	6	6,5	7	7,5	8
	Persentase pasar rakyat yang berkondisi baik	Persen	43	50	57	67	80
	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	Persen	15,57	23,89	32,03	40,05	47,81
	Persentase pengaduan konsumen yang terselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
	Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan (dalam persen)	Persen	6,26	5,35	5,70	5,88	6,26
	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah (IKM)	Persen	2,2	2,39	2,58	2,76	3
	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga berlaku	Persen	25,99	26,21	26,42	26,64	26,85
	Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB (dalam Juta rupiah)	Rupiah	9.591,60	10.070,15	10.548,71	11.027,26	11.505,82
	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	3,52	4,11	4,70	5,29	5,88
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	Per 10.000 penduduk	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Perda dan Perkada yang	Persen	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	ditegakkan						
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
	Tingkat Waktu Tanggap (respond time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	100	100
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Persen	18,06	26,41	51,7	74,46	89,7
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	97	99	100	100	100
	Persentase e-database yang dimanfaatkan pemerintah Daerah dalam perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten yang disusun tepat waktu	Dokumen	7	8	9	9	10
	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persen	75	80	85	90	95
	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100	100	100	100	100
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang tertib dan terukur	Persen	50	55	60	65	70
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Penetapan APBD tepat waktu	tepat waktu/	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
		tidak tepat waktu					
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	Persen	11,86	12,77	13,75	14,84	15,98
27	BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	Persentase Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Respon cepat darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	7100	7200	7250	7300	7500
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	7100	7200	7250	7300	7500
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	7100	7200	7250	7300	7500
	Persentase pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran	Persen	100	-	-	-	-
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
	Jumlah masyarakat yang memahami tentang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa	Orang	160	160	160	160	160
	Persentase parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
	Jumlah ormas dan LSM yang aktif	Ormas/LSM	25	25	25	25	25
	Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan	Persen	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	budaya yang ditindaklanjuti						
	Persentase daerah yang berpotensi konflik sosial, budaya, ekonomi, dan agama/SARA yang dapat di redam	Persen	100	100	100	100	100
29	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	Rasio PNS berpendidikan Tinggi (PT)	Persen	1,65	1,78	1,93	2,06	2,21
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	3,79	3,94	4,02	4,1	4,17
	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kompetensi	persen	100	100	100	100	100
	Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Fungsional	persen	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
30	KECAMATAN RAMBAH						
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80
31	KECAMATAN RAMBAH SAMO						
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80
32	KECAMATAN RAMBAH HILIR						
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80
33	KECAMATAN ROKAN IV KOTO						
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80
34	KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO						
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80
35	KECAMATAN TAMBUSAI UTARA						

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80
36	KECAMATAN TAMBUSAI						
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80
37	KECAMATAN TANDUN						
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80
38	KECAMATAN KABUN						
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80
39	KECAMATAN UJUNGBATU						
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80
40	KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM						
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80
41	KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM						
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80
42	KECAMATAN BONAI DARUSSALAM						
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80
43	KECAMATAN KEPENUHAN HULU						
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80
44	KECAMATAN KEPENUHAN						
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
			2022	2023	2024	2025	2026
45	KECAMATAN BANGUN PURBA						
	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik	Persen	80	80	80	80	80

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, SH, MH
 Penata Tk. I
 NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN